

## PENGEMBANGAN SUPERAPPS PELAYANAN PUBLIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN DATA SERTA LITERASI DIGITAL ASN

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

### Abstract

*The development of public service superapps in Indonesia, such as INA Digital and the Ministry of Law and Human Rights' Super Apps, promises service efficiency through NIK-based SSO integration in accordance with Presidential Regulation No. 95/2018 on the SPBE. However, the management of large-scale data poses significant cybersecurity risks, including personal data breaches and ransomware attacks, which are regulated by the Personal Data Protection Act No. 27/2022 under the principle of 'privacy by design'. This literature review analyses civil servants' digital literacy as a crucial pillar, noting that only 44.9% of civil servants possess good competencies despite the Ministry of Communication and Information Technology's LDSP programme reaching 80,000 participants. Findings indicate that synergy between data security (zero-trust architecture) and continuous civil servant training is necessary for digital trust and government transformation towards Indonesia Digital 2045.*

**Keywords:** *public service superapps, data security, civil servants' digital literacy, the 2022 Personal Data Protection Act, SPBE digital transformation, privacy by design, zero-trust architecture, INA Digital*

### Abstrak

Pengembangan *superapps* pelayanan publik di Indonesia, seperti INA Digital dan Super Apps Kemenkum, menjanjikan efisiensi layanan melalui integrasi SSO berbasis NIK sesuai Perpres SPBE No. 95/2018. Namun, pengelolaan data massal menimbulkan risiko keamanan siber signifikan termasuk kebocoran data pribadi dan serangan *ransomware*, yang diatur UU PDP No. 27/2022 dengan prinsip *privacy by design*. Kajian pustaka ini menganalisis literasi digital ASN sebagai pilar krusial, di mana hanya 44,9% aparatur memiliki kompetensi baik meski program LDSP Kominfo menjangkau 80.000 peserta. Temuan menunjukkan sinergi keamanan data (*zero trust architecture*) dan pelatihan berkelanjutan ASN diperlukan untuk *digital trust* dan transformasi pemerintahan menuju Indonesia Digital 2045.

**Kata Kunci:** *superapps pelayanan publik, keamanan data, literasi digital ASN, UU PDP 2022, transformasi digital SPBE, privacy by design, zero trust architecture, INA Digital*

### Pendahuluan

Transformasi digital pemerintahan telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional dalam dekade terakhir. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, terus mendorong inovasi layanan publik berbasis digital sebagai bagian dari strategi *e-government*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Cahyarini, 2021). Dalam konteks ini, penggunaan teknologi digital tidak lagi bersifat pelengkap, tetapi telah menjadi infrastruktur fundamental bagi penyelenggaraan birokrasi modern.

Perkembangan terbaru dari transformasi digital tersebut adalah lahirnya konsep *superapps*, yakni aplikasi terintegrasi yang mampu menghimpun berbagai layanan dalam satu ekosistem digital. *Superapps* memungkinkan masyarakat mengakses layanan kesehatan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, hingga pelaporan publik dalam satu platform terpadu (Katharina (Ed.), 2021). Konsep ini diadopsi dari ekosistem digital sektor swasta, seperti Gojek dan Grab, yang menunjukkan efisiensi melalui integrasi multi-layanan dalam satu sistem aplikasi.